

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada jaman penjajahan Jepang gerakan buruh sempat terhenti dan tidak berkembang. Situasi ini terjadi karena adanya tindakan represif dan ditambah dimatikannya banyak industri yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Baru kemudian setelah kemerdekaan Indonesia mulai bangkit gerakan buruh. Serikat buruh yang kuat pada masa itu salah satunya adalah SBII (Serikat Buruh Islam Indonesia) menyatakan siap untuk bekerja sama dengan serikat buruh manapun asal tidak merusak dasar-dasar Islam. Pada masa Orde Baru, terdapat peristiwa penting di dalam pergerakan buruh di Indonesia, yaitu dibentuknya Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) tahun 1966 dan Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia (MPBI) pada tanggal 1 November 1969. Dalam perkembangan selanjutnya, lahir pula Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Sejak lahir Orde Baru tersebut, gerakan buruh dimobilisir dari dibentuknya KABI (Kesatuan Aksi Buruh Indonesia) pada tahun 1966. Tujuannya ialah untuk bersama-sama kekuatan Orde Baru lainnya berjuang menumbangkan sisa-sisa G 30 S PKI, Perjuangan KABI bersifat politis sedangkan soal-soal yang bersifat

sosial ekonomi di selesaikan oleh sekretariat bersama buruh beserta anggota-anggotanya.

Di Jakarta pada tanggal 20 Februari 1973, berdiri FBSI (Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) dimana dalam tubuh FBSI masih dimungkinkan hidupnya serikat-serikat buruh. Berdirinya FBSI pada tanggal 20 Februari 1973 yang kemudian, pemerintah tanggal 11 maret 1974 melalui surat Menteri Transkop Nomor 286a/DD/Dphk/1974 tentang pengakuan organisasi buruh FBSI lalu didaftarkan pada tanggal 27 november 1975 sesuai dengan SK. Mentranskop Nomor Kep. 2236/DP/1975 tentang pendaftaran Federasi Buruh Seluruh Indonesia¹.

Pada tahun 1985 telah membuka sejarah baru bagi kaum buruh di Indonesia dimana FBSI merubah nama menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) diakui sebagai wadah pemersatu bagi kaum buruh dan pekerja. Kaum buruh di Indonesia telah mampu mempersatukan dirinya dalam satu wadah perjuangan dan satu tujuan bersama, yaitu suatu serikat dibidang perburuhan yang bersifat sosial-ekonomi. Dengan demikian orientasi utama dari wadah serikat SPSI adalah berupaya meningkatkan kesejahteraan para anggota dan keluarganya dan itu masih dipegang teguh hingga saat ini².

¹Zainal Asikin, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan Ed.1 Cet.10*, jakarta; Rajawali Grafindo, Hal.48

²Ibid, Hal.48

Salah satu perlindungan hak asasi manusia yaitu asas *principle of liberty* (prinsip kebebasan) dalam bidang hubungan kerja di Indonesia terdapat dalam Pasal 28 D Ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara tanpa memandang segala perbedaan yang ada pada diri seseorang berhak mendapatkan dan melakukan pekerjaan serta menerima imbalan secara adil.

Demikian juga di dalam Pasal 28 E Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pengertian dari ketentuan tersebut adalah bahwa setiap warga negara tanpa memandang segala perbedaan baik ras, jenis kelamin, agama dan lain-lain, berhak untuk menjadi bagian dari suatu serikat dan memanfaatkan serikat tersebut guna kepentingannya secara adil dengan memperoleh perlindungan akan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berserikat sebagai hak dasar tidak bisa dilepaskan dari pendekatan realitas kehidupan sosial dan politik dengan berbagai aspeknya seperti aspek ekonomi, pendidikan, agama dan sebagainya. Alasannya karena aspek-aspek tersebutlah yang sangat berperan membuat manusia kehilangan banyak kesempatan memperoleh kebebasan dirinya.

Kebebasan berserikat yang diinginkan oleh para pekerja dalam serikat buruh tidak diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan begitu saja, namun timbul karena adanya perkembangan gerakan buruh di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga keluarnya Undang-Undang No.21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh³.

Dalam bagian umum penjelasan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, menyatakan bahwa pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehubungan dengan hal itu, serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2000 menyatakan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Buruh bertujuan memeberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Pekerja

³Zainal Asikin, 2010, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan Ed.1, Cet.8*, jakarta; Rajawali Grafindo, Hal 27

sebagai anggota Serikat Pekerja/Buruh perlu diberdayakan, sehingga mengetahui hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum, termasuk kesadaran pekerja tentang pentingnya serikat pekerja sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingannya untuk menjadikan Serikat Pekerja/Buruh yang kuat, maka dibutuhkan partisipasi pekerja baik secara *materiil* dan *moril* yang sangat dibutuhkan, selain itu pengusaha juga perlu diberdayakan dengan pemberian pemahaman bahwa pekerja adalah mitra kerja dan faktor produksi yang penting karena itu harus diperhatikan hak-hak normatifnya sehingga mereka dapat bekerja secara normal dan optimal

Efektif tidaknya undang-undang tersebut dalam praktek berpulang kembali kepada *bargaining position* serikat buruh itu sendiri. Sejak beberapa dekade, kebebasan berserikat bagi para buruh telah dipasung. Terpasungnya serikat buruh di Indonesia ini berdampak luas termasuk tumpulnya suara buruh dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan.

Sejarah telah membuktikan bahwa peranan serikat pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan hak anggotanya sangat besar, sehingga pekerja/buruh telah banyak merasakan manfaat serikat serikat pekerja/serikat buruh yang betul-betul mandiri (*independence*) dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak buruh, misalnya pekerja secara individual berada dalam posisi lemah dalam

memperjuangkan hak-haknya, tetapi setelah menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh akan meningkatkan tawar dalam memperjuangkan hak-haknya. Serikat pekerja/serikat buruh dapat mengawasi (control) pelaksanaan hak-hak pekerja di perusahaan. Oleh karena itu, serikat pekerja/serikat buruh sangat berperan penting bagi pekerja⁴.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah serikat demokratis dan berkesinambungan yang dibentuk secara sukarela dari dan untuk pekerja dimana sebagai individu pekerja tidak akan mampu melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak-haknya, tetapi dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh mereka dapat mencapai kepentingannya serta hak-haknya karena Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai fungsi sebagai :

1. Sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) dan penyelesaian perselisihan industrial.
2. Sebagai wakil pekerja/buruh didalam lembaga kerja bersama dibidang ketenagakerjaan sesuai tingkatan.
3. Sebagai saranan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan Undang-Undangan yang berlaku.
4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak serta kepentingan anggotanya.

⁴<http://ksn.or.id/sejarah-dan-latar-belakang/> Diunduh pada tanggal 21 juni 2017 Pukul 12.40 WIB

5. Sebagai perencana, pelaksanaan dan pertanggung jawaban pemogokan kerja/buruh sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Menyampaikan saran kepada manajemen baik mengenai keluhan kesah pekerja maupun untuk menyempurnakan sistem kerja dan peningkatan produktivitas perusahaan.

Namun kenyataannya fungsi serikat pekerja/serikat buruh masih menitik beratkan pada fungsi normatif, dimana serikat pekerja/serikat buruh hanya berusaha dalam bidang membela hak-hak normatif pekerja, misal menuntut kenaikan upah, menuntut upah lembur yang belum dibayar, penanganan perselisihan hubungan industrial. Fungsi serikat pekerja/serikat buruh belum sampai memikirkan bagaimana upaya mensejahterakan pekerja dengan tidak tergantung dari perusahaan.

Fungsi serikat pekerja/serikat buruh sering dikaitkan dengan keadaan hubungan industrial, dimana hubungan industrial itu diartikan sebagai suatu sistem hubungan yang antara para pelaku didalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha,pekerja dan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melakukan penelitian mengenai “ **PELAKSANAAN FUNGSI SERIKAT PEKERJA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA UNTUK**

**MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH YANG
MENJADI ANGGOTA (Studi Kasus Serikat Pekerja
PT.PANJTATUNGGAL KNITTING MILL) ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan didalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi serikat pekerja/serikat buruh pada PT. Pantjatunggal knitting mill dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan fungsi serikat pekerja/serikat buruh pada PT. Pantjatunggal knitting mill dan bagaimana penyelesaiannya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi serikat pekerja/serikat buruh dalam memberikan perlindungan bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang akan timbul dalam memberikan perlindungan bagi pekerja

D. Manfaat Penelitian

Dimana penelitian ini dapat memberikan segala manfaat bagi peneliti dan pembaca baik secara teoritis maupun dari segi praktis

1. Dari segi teoritis, diharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan akademis untuk pengembangan ilmu hukum dan menambah bahan-bahan kajian terhadap pelaksanaan fungsi serikat pekerja/serikat buruh dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh yang menjadi anggota.
2. Dari segi praktis dimana diharapkan, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja dalam serikat pekerja/serikat buruh.

E. Metode Penelitian

Beberapa metode penelitian yang digunakan oleh peneliti :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara kualitatif, dimana metode kualitatif ini menekankan proses pemahaman penelitian atas perumusan masalah untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Penulis memilih metode ini karena didalam penelitian kualitatif menggunakan data berdasarkan observasi, wawancara atau arsip data. Dimana hasil penelitian kualitatif dapat memberikan hasil diskripsi penelitian yang beragam, hasil atau proses data penelitian kualitatif yang tidak akan mudah didefinisikan oleh metode kualitatif yang dimana pengguna metode kualitatif dapat memperoleh gambaran atau hasil yang menyeluruh tentang pelaksanaan fungsi Serikat Pekerja dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh yang menjadi anggota.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah diskriptif analitis yaitu hasil analisis data yang berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk narasi, jadi yang dimaksud penulis adalah ingin menelaah tentang pelaksanaan

fungsi Serikat Pekerja dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh yang menjadi anggota

3. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan fungsi serikat pekerja/serikat buruh dalam memberikan perlindungan hukum bagi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh yang menjadi anggota pada PT. Pantjatunggal knitting mill. Selain itu objek penelitian berupa responden dan narasumber

Responden :

- 1) Bp. Abdullah (staf HRD PT. Pantjatunggal knitting mill)
- 2) Bp. Rohmat (staf personalia PT. Pantjatunggal knitting mill)

Narasumber :

- 1) Bp. Dwi Supriyanto (ketua serikat pekerja PT. Pantjatunggal knitting mill)
- 2) Ibu. Indri (pekerja PT. Pantjatunggal knitting mill)
- 3) Bp. Margono (pekerja PT. Pantjatunggal knitting mill)

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai masalah yang bersangkutan dan berguna untuk membantu dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

4.1 Studi lapangan

Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung kelapangan dengan tujuan untuk memperoleh data primer Studi lapangan ini dilakukan dengan cara :

4.1.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara tatap muka atau tanya jawab langsung dimana peneliti dengan narasumber/ sumber data, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wawancara adalah pertemuan tanya jawab peneliti dengan informan untuk tanya jawab, seperti antara majikan dengan orang yang melamar kerja.⁵

Wawancara dilakukan dengan melibatkan responden dan narasumber yang terkait pada pokok masalah, peneliti melakukan wawancara kepada responden yaitu staff HRD PT. Pantjatunggal knitting mill dan staf personalia PT. Pantjatunggal knitting mill serta beberapa narasumber yaitu serikat pekerja PT. Pantjatunggal knitting mill dan pekerja/buruh PT. Pantjatunggal knitting mill

Peneliti menggunakan metode sempling untuk melakukan wawancara dimana metode tersebut hanya menggunakan

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta ; Pusat Bahasa, hal.1619

beberapa responden dan narasumber guna memperoleh data sebagai bahan penelitian.

4.2 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang diperoleh dari objek penelitian dan merupakan data pendukung dari data primer dimana pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi :

4.2.1 Bahan Hukum Primer

Meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh yaitu : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Meliputi bahan-bahan hukum yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dimana saling berhubungan serta membantu pengumpulan data

dengan karya-karya ilmiah para ahli dan hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

4.2.3 Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan-bahan yang membantu memberikan tambahan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum atau ensiklopedia.

Penulis dalam hal ini lebih menggunakan metode wawancara yang dinama menurut penulis menggunakan metode ini lebih efektif dalam mencari atau menggali suatu data serta informasi yang diperlukan.

5. Teknik Penyajian Data

Data yang dikumpulkan lalu diolah, diperiksa, dan dipilih sedemikian rupa baru kemudian data disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam bentuk uraian. Adapun penyusunan uraian tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu :

5.1 Menganalisa Data

Dimana tahap penganalisaan data ini dilakukan untuk pengkajian terhadap kumpulan-kumpulan data yang berupa perumusan atau kesimpulan.

5.2 Editing

Didalam tahapan ini yang dilakukan adalah pemeriksaan dan pengeditan data yang diperoleh dan terkumpul untuk mengetahui apakah hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan dari segi hasil, kebenaran yang didapat dilapangan dalam segala aspek yang diteliti oleh penulis.

6. Teknik Analisa Data

Segala hasil data yang diperoleh melalui hasil editing dari penelitian sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan yang kemudian dianalisa, berdasarkan kerangka-kerangka teori dari pemahaman yang berkembang saat penulis melakukan penelitian dan metafsirkan data yang diperoleh dengan metode kualitatif yaitu dengan analisa terhadap objek penelitian yang dimana data yang dibutuhkan berupa peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,serta buku dan literatur yang berkaitan dengan Serikat Pekerja/Buruh.

7. Sistematika Penulisan

Untuk memperdalam serta memperluas pemahaman tentang karya tulis ini, penulis menguraikan mengenai sistematika penulisan yang dimana penulisan ini terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I :Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :Tinjauan pustaka, berisi tentang tinjauan mengenai Serikat Pekerja/Buruh, tinjauan mengenai fungsi dan peranan, tinjauan mengenai hubungan Industrial.

BAB III :Pembahasan, berisis tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan peranan Fungsi Serikat Pekerja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh Yang Menjadi Anggota (Studi Kasus Serikat Pekerja PT.PANTJATUNG GAL KNITTING MILL tbk). Serta hamabatan-hambatan yang muncul dalam Pelaksanaan Fungsi Serikat Pekerja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh Yang Menjadi Anggota (Studi Kasus Serikat Pekerja PT.PANTJATUNG GAL KNITTING MILL tbk).

BAB IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran